

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Mariah *)

***Abstract:** Along with regional autonomy with the principle of decentralization, improvement of the quality of education requires the participation and empowerment of all components of education as a system. Approach to improving the quality of education in accordance with the above paradigm and idea is the concept of School Based Management or school-based management (SBM) Quality education can be seen from two things, namely pendidikan refers to the process and outcomes of education. The process of quality education if the entire educational component involved in the educational process itself. The factors in the educational process are the various inputs, teaching materials, methodology, and administrative support for infrastructure and hail pendidikan which refers to the achievements reached by the school at a certain time.*

***Keyword:** Policy, Quality Education, Local Autonomy*

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tuntutan terhadap pembangunan sektor pendidikan menjadi semakin luas seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Di satu pihak tetap terpenuhinya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah yang jumlahnya semakin bertambah sangat dibutuhkan. Sementara itu di pihak lain tercapainya efisiensi, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan juga tidak bisa diabaikan.

Dewasa ini dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar baik swasta maupun pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas layanan dan mutu yang ditawarkan sekolah. Setiap institusi pendidikan akan berusaha memaksimalkan jasa layanan dan meningkatkan mutu kepada masyarakat dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan dalam hal ini orang tua dan siswa itu sendiri. Kemajuan zaman dalam era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal terutama bidang yang terkait dengan dunia pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah

satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat mengawatirkan, ini terbukti antara lain dengan data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks pembangunan manusia (Human Development Indeks) yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, penghasilan perkepala yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan Indonesia (Human Development Indeks) makin menurun. Diantar 174 negara didunia, Indonesia menempati urutan 102 pada tahun 1996, ke 99 pada th 1997, ke 105 pada tahun 1998, ke 108 pada th 1999.

Kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data dari Balitbang tahun 2003 bahwa dari 146.052 SD, hanya 8 sekolah yang dapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program, dan 20.918 SMP di Indonesia juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan kategori The Middle Years Program, dan dari 8036 SMA hanya 7 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyara-

kat, berbangsa dan bernegara di dalam negeri dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa Indonesia perlu cepat disikapi dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pendidikan di Indonesia .

Permasalahan utama pendidikan ada dasarnya adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas maupun kesejahteraannya, (2) prasarana sarana belajar yang belum tersedia atau belum memadai, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif, dan penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antar wilayah. Dua permasalahan tersebut diatas menjadi bertambah parah karena tidak didukung dengan komponen-komponen utama pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas sarana dan prasarana, pembiayaan.

Masalah sarana pendidikan yang dihadapi sekolah, dimana sarana penunjang pendidikan belum sepenuhnya dimiliki oleh sekolah dan belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari sarana belajar seperti peralatan olah raga, praktikum serta beberapa sekolah masih belum memiliki lab. bahasa, sehingga kondisi ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar baik pada guru dan siswa serta akan berdampak pada kualitas hasil pembelajaran.

Manajemen sarana pendidikan sangat penting agar sarana pendidikan dapat berfungsi dengan baik dimana

berkaitan dengan penentuan, kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan dan pertanggung jawaban. Dalam hal pengadaan sarana pendidikan juga sering terjadi masalah tentang kebutuhan sarana pendidikan tetapi sarana tersebut tidak ada, dimana hal ini akan menghambat proses belajar mengajar serta akan mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar sehingga kualitas hasil pembelajaran menjadi tidak optimal.

Sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana tanpa mengesalkan peran pendidikan lainnya, harus diakui bahwa guru sebagai salah satu komponen pendidikan merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih, namun apabila tidak ditunjang oleh keberadaan guru yang berkualitas maka mustahil akan menimbulkan proses belajar mengajar yang maksimal. Oleh karena itu permasalahan tentang mutu pendidikan tidak akan pernah terlepas dari permasalahan kinerja guru sebagai tenaga pendidik.

Terdapat tiga tugas utama guru dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik adalah membimbing, mengajar dan melatih siswa sebagai peserta didiknya. Selain tugas tersebut guru harus dapat membantu murid dalam mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan lingkungannya melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Motivasi belajar yang diberikan oleh guru kepada para siswanya tergantung dari kebijakan sekolah dimana para guru itu bekerja. Pemberian motivasi dapat berupa layanan baik langsung maupun tidak langsung yakni layanan akademik, layanan bimbingan konseling, layanan pengembangan diri serta pemberian fasilitas belajar yang memadai dan suasana sekolah yang nyaman. Motivasi sangat penting karena dengan adanya motivasi diharapkan setiap siswa mau belajar dengan baik dan

mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta mendorong para guru agar dapat bekerja sama dan membantu dalam proses belajar siswa di sekolah.

Masalah lain yang sering dihadapi sekolah adalah motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya, serta kualitas pendidikan dan kepuasan orang tua dan siswa menjadi hal yang penting, oleh karena itu sekolah harus membangun kualitas pembelajaran yang baik bagi menunjang proses belajar siswa sehingga siswa menjadi termotivasi untuk belajar mandiri dengan segala fasilitas yang ada di sekolah disamping bimbingan dari para guru. Fasilitas sarana dan prasarana serta layanan yang prima yang dilakukan sekolah baik terhadap para siswa maupun para guru pendidik sangat membantu dalam memajukan peningkatan belajar siswa di sekolah.

Belajar dari kondisi tersebut, solusi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Sebagai penjabarannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 Tentang standar nasional Pendidikan .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang” Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan“ Penulis dalam membahas makalah ini membatasi diri bahwa analisis kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka otonomi daerah hanya terfokus pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Makassar.

B. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi apa saja fakta-fakta yang diduga berhubungan dengan Kualitas Pembelajaran siswa

pada SMA Negeri di Kota Makassar, yaitu :

1. Kualitas pembelajaran siswa yang masih rendah, hal ini dapat dilihat berdasarkan standar ketuntasan belajar yang rata-rata di bawah 7.
2. Fasilitas sarana pendidikan yang masih kurang lengkap, ini dapat dilihat dari sedikitnya sarana pendukung pelaksanaan KBM seperti infokus, CD pembelajaran, buku-buku penunjang, dsb.
3. Para guru yang kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar, hal ini dapat diketahui masih ada beberapa guru yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pembelajaran. (Guru TBC)
4. Minat belajar siswa yang masih rendah, yang dapat dilihat dari masih sedikitnya siswa mengunjungi perpustakaan untuk membaca.
5. Kurangnya perhatian terhadap manajemen sarana pendidikan, hal ini dapat dilihat dari tata kelola sarana pembelajaran yang masih belum baik.
6. Motivasi kerja guru dalam mengajar yang kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari masih ada beberapa guru yang datang terlambat masuk kelas.

Dari fakta-fakta tersebut diatas maka penulis membuat identifikasi masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan publik tentang peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Makassar ?
2. Bagaimana penerapan atau implementasi kebijakan public tersebut, dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan pada SMA Negeri di Kota Makassar ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan tentang analisis peningkatan kualitas

pendidikan menengah dalam rangka otonomi daerah ini, penulis membatasi diri hanya berfokus pada sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Makassar yang dibahas secara umum.

KAJIAN TEORI

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan pendidikan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Dalam rangka mencapai mutu pendidikan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik berupa undang-undang maupun peraturan menteri seperti UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan UU. No 25 Tentang Pembangunan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring dengan itu, di era otonomi daerah Kebijakan strategis yang diambil Derjen Pendidikan dasar dan Menengah Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan publik Parker (dalam Santoso, 1998:4) menambahkan bahwa kebijakan Publik sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dalam suatu subyek atau tanggapan pada suatu krisis. Menurut William N Dunn (1981:70) yang dialih bahasakan oleh Muhajir Darwin (1987:63-64) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih ber-

hubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat. Carl Frederich menambahkan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (Obyektive) atau kehendak (porpoce)

Berkenaan dengan otonomi daerah, Makassar sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar dengan Dinas Pendidikan adalah sebagai pemegang kewenangan pembuatan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah khususnya bidang Pendidikan. Selaras seperti apa yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (2004; 16) pada hakekatnya kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Menurut Thomas Dye: bahwa kebijakan Public sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Whatever government chooses to do or not to do). Hal ini sejalan seperti apa yang disampaikan oleh Soebekti Wibowo (1994:190) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

Untuk memecahkan masalah tentang kualitas pendidikan di Kota Makassar, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan menyusun melakukan beberapa upaya perbaikan diantaranya sarana dan prasarana pendidikan. Kebijakan Publik yang dikeluarkan pemerintah berupa, Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai upaya meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia, khususnya di kota Makassar.

PP No. 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional pendidikan pada penjelasan pasal 11 ayat (2) dan (3), Dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki Kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah/Madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terakait dengan hal tersebut Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan kedalam Kategori Mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi standar Nasional Pendidikan ke dalam ke dalam Kategori Standar. Sekolah tersebut dapat dikategorikan SKM/SSN karakteristiknya adalah sudah melaksanakan 8 standar Nasional Pendidikan yaitu (1) Standar isi dan standar Kelulusan, (2) Standar Proses, (3) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (4) standar sarana dan Prasarana, (5) Standar Pengelolaan, (6) Standar Pembiayaan, (7) Standar Penilaian (8) Kesiapan Sekolah dan Dukumen Eksternal. Untuk mencapai SKM/SSN yang harus melaksanakan 8 standar/komponen tadi 56 aspek dan 229 indikator yang harus dipenuhi diantaranya adalah kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran..

Berdasarkan PP. No.19 Tahun 2005 bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah daerah bersama dikmen mengembangkan tiga model sekolah di Kota Makassar, yaitu (1) Calon Sekolah Standar Nasional/RSKM/SSN (2) Sekolah Kategori Mandiri/SKM, (3) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/RSBI/SBI. Yang menjadi Pertanyaan adalah Bagaimana fasilitas/Sarana dan prasarana disekolah tersebut ? Sudah standar/belum ? ini yang menjadi tugas berat bagi Pemerintah kota Makassar dan Propinsi Sulawesi Selatan. Sarana dan Prasarana sangat berpengaruh besar terhadap kualitas pembelajaran yang akhirnya berimbas pada prestasi Akademik.

Public policy yang digulirkan pemerintah baik pusat maupun daerah pasca terlaksananya (efektifitasnya UU RI. Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), setidaknya dapat mempengaruhi bagi dunia Pendidikan menengah khususnya, di kota Makassar ini Salah satu implementasi dari kebijakan UU tersebut adalah lahirnya perdiknas RI No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah, dengan demikian tugas dan fungsi kepala sekolah dapat lebih optimal karena berdasarkan kompetensi (kemampuan) yang mereka miliki benar-benar telah terqualifikasi dengan baik. Sehingga diharapkan dapat menjalankan manajemen pembelajaran dengan baik.

Dengan adanya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (dana Alokasi Khusus) yang dihasilkan oleh daerah, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentunya ada jatah dalam pembagian keuangan tersebut untuk membiayai sektor pendidikan, selain dana dari APBN, dekonsentrasi, desentralisasi atau otonomi daerah. Sehingga kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dapat dilaksanakan dan tercapai yang akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran dan selanjutnya berpengaruh pada prestasi akademik dan non akademik dalam upaya peningkaytan kualitas pendidikan khususnya di Kota Makassar.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa satu strategi yang indonesia tetapkan sebagai standar dalam mengembangkan keunggulan pengelolaan sekolah adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) Penegasan ini dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 51 ayat 1 bahwa pengelolaan satuan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan model aplikasi manajemen instiusional yang mengintegrasikan seluruh sumber internal dan eksternal dengan lebih menekankan pada pentingnya menetapkan kebijakan melalui perluasan otonomi sekolah.

PEMBAHASAN

Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa (nation Character Building) untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan kualitas pendidikannya. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian yang integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Seiring dengan otonomi daerah dengan asas desentralisasi, peningkatan kualitas pendidikan menuntut partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen pendidikan sebagai suatu sistem. Pendekatan peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan paradigma dan gagasan tersebut diatas adalah konsep School Based management atau manajemen berbasis sekolah (MBS) Mutu pendidikan dapat dilihat dari dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, bahan ajar, metodologi, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada kurun waktu tertentu.

Kualitas atau mutu pendidikan dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relatif (Edward & Sallis 1993). Dalam konsep absolut suatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna artinya barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Sedangkan dalam konsep relatif kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (fit for their purpose).

1. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan dalam konsep

relatif, terutama yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek yaitu pelanggan internal dan eksternal (Kamisa, 1997, dalam Nurkolis). Pendidikan berkualitas apabila: Pelanggan internal (Kepala sekolah, Guru dan karyawan sekolah) berkembang baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial, sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dan kreatifitas.

2. Pelanggan eksternal

- a. Eksternal primer (para siswa) menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya lapangan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, integritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Phillip Hallinger, 1998, dalam Nurkho;is). Siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab akan hidupnya.
- b. Eksternal skunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan) Para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahaan dalam hal menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan.
- c. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas) para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Program pemerintah Kota Makassar dalam pengembangan sekolah tingkat menengah diantaranya adalah Meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan proporsi guru yang berpendidikan minimal S-1, dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SMU/MA? SMK yang lebih baik dan terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school /community based management)

Sekolah yang di kategorikan sebagai sekolah bermutu adalah apabila telah memenuhi 8 (delapan) standar Nasional pendidikan yaitu.

1. Standar isi dan standar kelulusan
2. Standar Proses
3. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
4. standar sarana dan prasarana
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Penilaian
8. Kesiapan Sekolah dan Dokumen eksternal

Dari delapan standar tersebut masing-masing standar terdiri dari beberapa aspek dan indikator :

- Standar isi terdiri dari 5 aspek dan 13 indikator
- Standar Proses terdiri dari 3 aspek dan 20 indikator
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 2 aspek dan 16 indikator.
- Standar Sarana dan Prasarana 21 aspek dan 81 indikator
- Standar Pengelolaan terdiri dari 17 aspek dan 67 indikator
- Standar pembiayaan terdiri dari 3 aspek dan 9 indikator
- Standar Penilaian terdiri dari 3 aspek dan 14 indikator

Berdasarkan penjelasan PP No 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat (2) bahwa ciri Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah terpenuhinya standar nasional pendidikan dan mampu menjalankan sistem kredit semester.

Dari ciri tersebut Sekolah Kategori Mandiri/ Sekolah Standar Nasional memiliki profil sebagai persyaratan minimal.

a. Dukungan Internal

Kinerja sekolah terakreditasi A, rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00, presentase kelulusan UN >90% untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir > daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang diraih, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa perkelas maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru, ada pertemuan rutin antara sekolah dengan orang tua. Kurikulum, dengan indikator memiliki kurikulum sekolah kategori mandiri, beban studi dinyatakan dengan SKS, mata pelajaran yang ditawarkan ada yang wajib dan pilihan, panduan/dokumen penyelenggaraan, memiliki pedoman pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menjajaki potensi peserta didik dan memiliki pedoman penilaian. Kesiapan Sekolah : dengan indikator sekolah menyatakan bersedia melaksanakan sistem kredit semester, presentasi guru yang menyatakan ingin melaksanakan SKS > 90 % , pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, kemampuan staf akademik dalam menggunakan computer

Sumber daya manusia : Dengan indikator persentase guru memenuhi kualifikasi akademik >75%, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan > 90%, rasio guru dan siswa, jumlah tenaga administrasi akademik memadai, tersedia guru bimbingan konseling/karier, fasili-

tas disekolah dengan indikator memiliki ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang unit kesehatan, tempat olahraga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium, Bahasa, Teknologi informasi/komputer, Fisika, Kimia, Biologi, Multimedia, IPS, Perpustakaan yang memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran, memberikan layanan bimbingan karier.

b. Eksternal

Untuk menyelenggarakan SKM/ssn berasal dari dukungan komite sekolah, orang tua peserta didik, dukungan dari dinas Pendidikan Kabupaten/kotamadya, dukungan dari tenaga pendamping SKS. Sedangkan untuk Sekolah Bertaraf Internasional Pemerintah Kota Makassar sudah mulai merespon namun boleh dikatakan belum berhasil. UU Sisdiknas tahun 2003 memang telah memperkenalkan klasifikasi sekolah Baru, sekolah tersebut dinamakan SBI, Sekolah dengan Kategori Mandiri (SKM), dan kelompok Sekolah Biasa (SB) Pada SBI Penyelenggara diberi ruang untuk menggunakan silabus pembelajaran dan penilaian yang umumnya dipakai pada sekolah menengah di negar-negara yang bergabung dalam OECD.

A. Strategi implementasi

Berkaitan dengan program rintisan SKM/SNN, pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh:

1. Dinas Propinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Menyiapkan petugas verifikasi calon rintisan SKM/SSN
- b. melakukan verifikasi calon SKM/SSN berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA

- c. Menetapkan SMA rintisan SKM/SSN
- d. bersama-sama dengan Direktorat Pembina SMA memberikan pendampingan kepada sekolah yang telah ditetapkan SKM/SSN dalam penyusunan program kerja.
- e. Memberikan dana bantuan block Grant bagi SMA rintisan SKM/SSN melalui deana dekonsentrasi
- f. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi SMA rintisan SKM/SSN di daerahnya untuk mendorong percepatan pencapaian Kategori Mandiri/Standar Nasional melalui kebijakan, pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia sesuai yang dipersyaratkan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan.
- g. Bersama-sama dengan Direktorat Pembinaan SMA melakukan supervisi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program rintisan SKM/SSN
- h. Memperluas program rintisan SKM/SSN.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Merekomendasikan calon SMA rintisan SKM/SSN, kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
- b. Melakukan verifikasi calon SKM/SSN
- c. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi SMA rintisan SKM/SSN didaerahnya untuk mendorong percepatan pencapaian kategori mandiri/standar nasional melalui kebijakan,

pendanaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan.

- d. Bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA Melakukan supervisi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program rintisan SKM/SSN
- e. Memperluas sasaran program rintisan SKM/SSN di daerahnya

3. SMA Rintisan SKM/SSN

Berkaitan dengan program rintisan SKM/SSN, pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh SMA rintisan SKM/SSN antara lain :

- a. Menyusun program pencapaian kategori mandiri/standar nasional Pendidikan jangka menengah (3 tahun) yang dioperasionalkan dalam program tahunan.
- b. Melaksanakan program sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan
- c. Proaktif mengembangkan diri dengan menggerakkan dan mendayagunakan potensi sumber daya internal dan eksternal sekolah.
- d. Secara bertahap melaksanakan SKS
- e. Melakukan evaluasi internal terhadap tingkat keterlaksanaan program rintisan Sekolah Kategori mandiri/Sekolah Standar Nasional
- f. Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal untuk mencapai kategori mandiri/Standar Nasional

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan utama pendidikan di Indonesia adalah disparitas mutu

atau kualitas pendidikan yang kaitannya dengan, ketersediaan pendidikan dan tenaga pendidikan, kesejahteraan, sarana dan prasarana belajar, pendanaan, proses pembelajaran, penyebaran sekolah yang tidak merata, lebih parah lagi tidak didukung komponen pendidikan seperti kurikulum, SDM, sarana dan prasarana dan pembiayaan. sehingga menjadikan semakin menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Solusi Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kemudian dijabarkan melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan diberlakukannya Standar Nasional pendidikan pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan kedalam kategori mandiri dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan kedalam Kategori Standar., dan Sekolah Kategori Mandiri diharapkan untuk menjadi sekolah RSBI/SBI. Tiga Model Sekolah dikembangkan di Kota Makassar. Tiga Kategori sekolah itu yakni Calon Sekolah Standar Nasional (SSN)/RSKM (Rintisan Sekolah Kategori Mandiri) SSN/Sekolah Kategori Mandiri dan Rintisan sekolah Bertaraf Internasional.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar, perlu kiranya penambahan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah

yang memadai, kesejahteraan Guru yang harus semakin ditingkatkan/tidak diskriminatif, kelengkapan sarana dan prasarana sudah merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Kartini Kartono, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pradnya Paramita

Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, halm. 68

Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah, *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*, Bandung Grasindo, 2004

Tilaar, H.A.R *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta, Reneka Cipta, 2006

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang Undang Republik Indonesia No. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE **Nobel Indonesia** Makassar